

Danny Pomanto Dampingi Pj Gubernur Sulsel Terima Komisi V DPR RI, Pastikan Kesiapan Lahan Pembangunan Stadion



Sumber gambar:

<https://pluz.id/2024/04/05/danny-pomanto-dampingi-pj-gubernur-sulsel-terima-komisi-v-dpr-ri-pastikan-kesiapan-lahan-pembangunan-stadion/>

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Makassar, Jumat (5/4/2024). Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, dalam rangka kunjungan kerja dan memastikan kesiapan lahan pembangunan stadion sepak bola di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Termasuk memastikan persoalan teknis menyangkut soal keamanan lalu lintas udara. Kawasan Operasi Keselamatan Penerbangan (KKOP). “Jadi kami dari Komisi V DPR RI ingin memastikan kesiapan lahan dari rencana pembangunan stadion. Alhamdulillah, Pak Gubernur beserta Wali Kota Makassar dan Bupati Maros memediasi untuk menyiapkan lahan, sehingga APBN kita masuk mengintervensi untuk pembangunan itu,” kata AIA, sapaan akrab Andi Iwan Darmawan Aras.

Ia menyebutkan, DPR RI telah menyetujui untuk menggelontorkan APBN terkait pembangunan stadion dengan skema multi-years. Terlebih rencana pembangunan stadion ini merupakan arahan langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo berdasarkan aspirasi masyarakat Sulsel. Ia juga mengapresiasi Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, yang akan membangun akses jalan menuju stadion dengan alokasi APBD Rp200 miliar. “Insya Allah, tahun ini juga sudah bisa kita mulai pembangunannya (stadion). Untuk infrastruktur jalan, tidak akan jadi masalah karena akan ditangani Pak Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Wali di bawah arahan Pak Gubernur, ” ucap AIA, yang juga Ketua DPD Gerindra Sulsel ini.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyebut, akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar di APBD Perubahan untuk pembangunan akses jalan untuk menopang konektivitas di kawasan Stadion. “Kami menyiapkan Rp200 miliar, tapi kelihatannya bisa lewat. Dan, kami juga sementara menggambar (desain). Sehingga dana pusat bisa difokuskan ke pembangunan stadion,” ungkap Danny Pomanto.

Apalagi, stadion bertaraf Internasional ini juga memiliki kapasitas 30 ribu penonton. Bahkan, diharapkan bisa mencapai 50 ribu penonton, sehingga dirinya merasa bahagia karena pembangunan stadion ini merupakan mimpi dari masyarakat Sulsel dan Makassar khususnya. Tentunya dengan ROW (Right Of Way) atau lebar disesuaikan dengan kapasitas maksimal stadion dan memperhitungkan penguraian lalu lintas dan exit yang efektif. “Khusus jalan di dalam dengan kapasitas untuk stadion dengan ROW, lebarnya yang cukup dengan kapasitas maksimal dengan eksit yang baik saya sudah izin pak gubernur pemerintah kota akan siapkan,” ujarnya.

Sementara, Pj Gubernur Sulsel. Bahtiar Baharuddin berharap, Presiden Joko Widodo dapat melakukan groundbreaking pada Juli atau Agustus 2024. Saat itu, Presiden Jokowi tengah berada di Makassar dan akan bertepatan dengan jadwal peresmian RS Khusus Jantung, Otak, dan Kanker di Kawasan CPI.

Selain itu, Dengan cikal bakal sebagai pusat perdagangan dan transportasi maritim sejak masa kolonial Belanda, Makassar kini berada di jalur menuju kemajuan infrastruktur yang mengesankan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kota ini sebagai kawasan metropolitan.

Melalui proyek 'Mamminasata', yang melibatkan beberapa daerah di sekitarnya seperti Maros, Sungguminasa, Takalar, dan Pangkep, Makassar diharapkan menjadi salah satu penopang utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang terletak di Kalimantan Timur.

Wali Kota Makassar Moh Ramadhan 'Danny' Pomanto menerima dengan baik arahan dari Presiden Jokowi. Dia menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan untuk memajukan proyek 'Mamminasata', yang diharapkan dapat menjadikan Makassar sebagai kota metropolitan yang sejajar dengan Shenzhen di China. Berbagai pembangunan infrastruktur di Makassar telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung aktivitas publik.

Dari transportasi umum yang terintegrasi hingga fasilitas olahraga dan perpustakaan, Makassar mengalami kemajuan yang signifikan. Salah satu contohnya adalah adopsi Bus Rapid Transit (BRT) atau Trans Mamminasata yang telah terintegrasi dengan baik sejak pertengahan 2015.

Dengan sekitar 200 unit bus yang beroperasi di empat koridor, Trans Mamminasata menawarkan pengalaman perjalanan yang nyaman dan efisien dalam kota. Dengan total 1.101 unit pete-pete yang beroperasi di 14 trayek dalam kota, pete-pete telah menjadi bagian integral dari sistem transportasi publik Makassar.

Tak hanya itu, infrastruktur jalan yang berkualitas juga menjadi salah satu fokus pembangunan. Dengan total panjang jalan mencapai 789,65 kilometer pada tahun 2023, Makassar telah berhasil membangun jaringan jalan yang baik, sebagian besar telah beraspal dan beton. Dengan luas wilayah 175,77 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 1.474.393 jiwa, Makassar merupakan pusat ekonomi dan kegiatan sosial di Sulawesi Selatan.

Dengan pandangan ke Selat Makassar di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, Makassar terus menapaki jalan menuju kemajuan sebagai kota metropolitan Mamminasata yang semakin berkembang

Sumber Berita :

1. <https://pluz.id/2024/04/05/danny-pomanto-dampingi-pj-gubernur-sulsel-terima-komisi-v-dpr-ri-pastikan-kesiapan-lahan-pembangunan-stadion/> 5 April 2024.
2. <https://www.harianhaluan.com/news/1012441141/sulawesi-selatan-terus-genjot-infrastruktur-makassar-menuju-kemegahan-bakal-bertransformasi-menjadi-kota-metropolitan-mamminasata?page=2> 17 April 2024.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

1. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
2. Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.

3. Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
4. Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.